

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SECARA TERPADU

(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen)

Ilyas Ismail

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Almuslim

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dalam memperoleh dan menafsirkan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil penelitian adalah kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah dengan membuat kerangka pikir seperti data wilayah Bireuen, produksi batang kelapa, jumlah area yang ditanam, data dana baik dari provinsi maupun pusat, data akan arah pengembangan kelapa terpadu di Bireuen, amino masyarakat Bireuen terhadap kelapa sendiri, dan inpres serta kepres terhadap industri kelapa. Faktor yang menghambat Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah berupa tidak adanya implementasi qanun yang menetapkan untuk dapat berdirinya industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, meskipun berbagai macam desain kebijakan telah dirancang, namun tidak dapat diimplementasikan secara baku dan sah. Faktor lain dapat berupa kurang modal dasar pembangunan yang dimiliki oleh daerah kabupaten sendiri. Selanjutnya faktor yang menghambat pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen berupa kurangnya akses bantuan modal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi serta tidak lancarnya arus implementasi luar negeri yang masuk ke Kabupaten Bireuen.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah dan Industri Kelapa Secara Terpadu

PENDAHULUAN

Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keunggulan daerah Kabupaten Bireuen adalah komoditi perkebunan dan pertanian diantaranya adalah kelapa. Kelapa merupakan komoditi penting bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian khususnya daerah Kabupaten Bireuen. Produk tanaman kelapa selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat juga sebagai sumber pendapatan daerah melalui ekspor. Lahan kelapa merupakan lahan dengan areal terluas di Kabuptan Bireuen dibandingkan dengan lahan pertanian dan perkebunan lainnya, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budidaya setelah padi.

Pembangunan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan arah dan sasaran tersebut

pembangunan industri harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang.

Dalam kaitannya dengan penyediaan lapangan pekerjaan, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen yaitu pemberian kemudahan dalam perizinan pembangunan terutama pengadaan industri baru terutama untuk industri kecil. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan serta terobosan probisnis di Kabupaten Bireuen melalui beberapa Peraturan Daerah, yang mana peraturan-peraturan terdahulu tentang proses perizinan yang berbelit-belit serta memakan biaya yang relatif tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor industri secara terpadu di Kabupaten Bireuen meliputi masalah belum diterapkannya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Hal ini terlihat dari belum adanya pemanfaatan limbah seperti sabut dan

tempurung kelapa untuk menghasilkan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi. Tidak adanya kebijakan pemerintah dalam menentukan persyaratan untuk memperoleh kredit model sehingga tingkat bunga dinilai terlalu tinggi. Semakin ketat persaingan akibat pemerintah tidak berperan dalam hal penetrasi pasar yang mengakibatkan harga bahan baku menjadi tidak stabil. Sulitnya mendapatkan tenaga kerja yang terampil akibat pemerintah daerah yang kurang memperhatikan kualitas tenaga kerja dipasar tenaga kerja.

Akibat dari kurangnya perencanaan dan desain pemerintah daerah dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu, sehingga sampai saat industri pengolahan di Kabupaten Bireuen belum terlaksana sebagaimana perencanaan dasar. Dampak lain adalah hasil komoditas kelapa di Kabupaten Bireuen terpaksa di ekspor dalam bentuk produk primer dengan harga yang relatif murah.

Di samping itu masih kurang kepedulian pihak pemerintah daerah dalam hal informasi pasar, perkembangan dan persaingannya. Padahal mereka seharusnya bertanggung jawab dan sangat berkepentingan terhadap perkembangan usaha kecil di daerahnya. Serta distorsi pasar yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan Pemerintah yang tidak kondusif, yang disengaja maupun yang tidak disengaja lebih menguntungkan pengusaha besar, termasuk investor asing. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat dunia usaha, khususnya para pengusaha sektor industri terpadu yang menyangkut peluang dan pangsa pasar yang sangat memungkinkan dimasuki oleh para pengusaha. Jadi produksi sektor industri diharapkan omset penjualannya berskala makro baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Informasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh dari dinas instansi tersebut. Penyuluhan dapat dilaksanakan melalui pertemuan seluruh usaha sektor industri terpadu dengan para petugas/penyuluh dari Dinas tersebut serta para pengusaha. Selain

itu melalui kegiatan pelatihan bagi para usaha kecil serta penyuluhan langsung ke lapangan (ke tempat-tempat usaha kecil) oleh para petugas/penyuluh dari dinas/instansi terkait (termasuk Dinas Pertanian).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bireuen yaitu pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen, Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan September hingga Januari 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dalam memperoleh dan menafsirkan data dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Arikunto, 2004:37). Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara langsung tentang fenomena di lapangan berdasarkan hasil observasi dan hasil pengamatan. Dalam penggunaan data kualitatif, terutama dalam penelitian yang digunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk, uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angkanya melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dilaksanakan, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 28 Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang No.48 Tahun 1999 Tanggal 12 Oktober 1999. Luas Wilayahnya 194.864 Km², terdiri atas 17 Kecamatan, 69 pemukiman, dan 583 Gampong (desa). Kabupaten Bireuen terletak pada garis 40-

540, 180 Lintang Utara dan 960.200-970.210 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie

Topografi Kabupaten Bireuen terdiri dari pantai dengan dataran rendah di sebelah Utara dan daerah pegunungan di sebelah selatan. Luas tanah menurut penggunaannya terdiri dari 17.172 Ha perkampungan, 22.948 Ha persawahan, 34.013Ha tegalan, 37.994 Ha perkebunan rakyat, 5.194 Ha tambak, 5.952 Ha berupa semak/ alang-alang, 4.642Ha hutan belukar, 32.286Ha tebat, 2.072Ha kebun campuran, 965Ha perkebunan besar, 564Ha danau dan rawa. Kabupaten Bireuen dilalui oleh 6 buah sungai, yaitu : Krueng Samalanga, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng Nalan, Krueng Peudada dan Krueng Peusangan yang semuanya bermuara di Selat Malaka. Di Kabupaten Bireuen juga terdapat 4 dataran tinggi atau pegunungan yaitu Gunong Ujong, Gunong Panyang, Gunong Kareueng, dan Gunong Batee.

Luas Kabupaten Bireuen adalah 194,864 km². Dari data perkecamatan yang terluas adalah Kecamatan Peudada yaitu 39,132 km² dan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya adalah Keucamatan Peusangan Siblah Krueng yaitu 7.563 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2005 adalah 351,835 jiwa, sedangkan pada tahun 2006 berjumlah 377.715 jiwa yang terdiri atas 182.756 laki-laki dan 194.959 perempuan. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2000-2006 terjadi peningkatan sekitar 3% pertahun yang merupakan catatan pada tahun 2006. pada tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen yaitu sebesar 359.032 jiwa. (BPS Kabupaten Bireuen, Bireuen Dalam Angka 2011)

Bila dilihat tingkat kepadatan penduduk perkecamatan di Kabupaten Bireuen, tercatat bahwa Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Peusangan

meliputi 43.623 jiwa dan Kecamatan Kota Juang 43.533 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pandrah 8.623 jiwa dan Kecamatan Siblah Krueng 10.167 jiwa.

Hasil Penelitian

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kelapa Terpadu di Kabupaten Bireuen

Pembangunan sektor industri hampir selalu menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah sedang berkembang, hal ini disebabkan karena sektor industri dianggap sebagai sektor pemimpin (*the leading sector*) yang mendorong perkembangan sektor lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Berdasarkan kenyataannya, tidak mengherankan jika peranan sektor industri semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu daerah termasuk juga Kabupaten Bireuen. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen :

Kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah dengan membuat kerangka pikir seperti data wilayah Kabupaten Bireuen, produksi batang kelapa, jumlah area yang ditanam, data dana baik dari provinsi maupun pusat, data akan arah pengembangan kelapa terpadu di Kabupaten Bireuen, amino masyarakat di Kabupaten Bireuen Bireuen terhadap kelapa sendiri, dan inpres serta kepres terhadap industri kelapa. (Hasil wawancara, Kamis 26 September 2013).

Untuk memberdayakan ekonomi rakyat, pemerintah Kabupaten Bireuen dapat mengarahkan langkah strategis dibidang perindustrian dengan mengembangkan industri-industri yang terkait dengan industri besar. Industri-industri kecil dan menengah yang kuat menjadi tulang punggung industri daerah. Dalam realisasinya, proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agroindustri dan perlunya, penguasaan teknologi tepat guna. Berikut

adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Bimbingan atau bantuan dalam upaya pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, Dinas Perindustrian memiliki harapan yang positif, dimana jika industri pengolahan kelapa secara benar-benar dapat dikembangkan di Kabupaten Bireuen, pihak dinas akan bersedia memberikan bimbingan baik para pelaku industri maupun bagi petani kelapa sebagai pemasok atau penyeter bahan baku (hasil wawancara Kamis, 26 September 2013).

Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus dijalankan dengan baik dan seimbang. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seharusnya merupakan representasi dari aspirasi masyarakat. Sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak. pengelompokan industri pada suatu lokasitertentu dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan sebagai dampak penurunan biaya eksternal industri akibat pemakaian bahan baku, tenaga kerja ahli, jaringan kerjasama/bisnis, biaya transportasi (pemasaran) secara bersama-sama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Staf Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen, dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu Staf Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen telah menjadi fasilitator dan regulator dengan berbagai kebijakan yang sudah pernah dirancang untuk berdirinya sebuah industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, namun kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena pemerintah kabupaten bireuen tidak mengeluarkan sebuah kebijakan langsung sebagai jaminan untuk dapat berdirinya industri pengolahan kelapa di Kabupaten Bireuen. (hasil wawancara, kamis 26 September 2013).

Pemerintah harus mengupayakan agar pembangunan industri dapat memberikan kontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja secara optimal sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan dalam pembangunan dalam memberikan kedudukan yang

dominan dalam proses produksi. Namun bukan berarti bahwa pemerintah tidak memperhatikan subsektor industri yang lain atau sektor ekonomi yang lain. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Adanya otonomi daerah sangat mendukung pemerintah daerah dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, karena pemerintah memiliki kewenangan yang luas dan nyata dalam membangun daerahnya, namun yang menjadi penghambat pembangunan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen adalah pemerintah daerah sendiri yang belum mengimplementasikan qanun ini secara sah. (hasil wawancara, Kamis, 26 September 2013).

Salah satu upaya menuju kemandirian daerah adalah memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Upaya yang dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga daerah mampu mandiri dan tidak tergantung kepada pusat. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah akan memiliki peran yang cukup strategis terkait dengan tumbuh dan berkembangnya industri-industri di daerah. Dalam rangka mengkonsolidasikan pembangunan sektor primer, sekunder, dan tersier termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan klaster industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horizontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringanproduksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat.

Hasil wawancara dengan para pedagang kelapa di Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa desain pemerintah dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen akan berdampak pada harga bahan baku kelapa di kabupaten Bireuen tergantung pada pemerintah daerah, khususnya kebijakan dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten

Bireuen, karena dinas tersebut bersama masyarakat yang mampu menjawab tantangan keberadaan dan ketersediaan bahan baku di lapangan, sementara harga kelapa di Kabupaten Bireuen saat ini berkisar antara Rp. 1000 sampai Rp. 1.700, sedangkan harga pasaran di Medan mencapai Rp. 4.000 sampai Rp. 5.000

Konsep pengembangan kekuatan dari dalam yang mengarah kepada pemberdayaan potensi daerah memacu pengkajian mengenai sektor industri. Intervensi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah menjadi unsur utama dalam pengembangan sektor industri. Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap perkembangan industri dapat dilihat dari instrumen kebijakan yang dikeluarkan. Ketetapan dan konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah menjadi penyebab maju atau mundurnya pengembangan klaster industri di Kabupaten Bireuen.

Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana agar terjadi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan produksi. Sehingga tenaga kerja atau masyarakat juga mempunyai peranan yang besar dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Faktor Penghambat Pengembangan Industri Kelapa Terpadu di Kabupaten Bireuen

Kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan lahan untuk kawasan industri merupakan bentangan lahan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen :

Faktor internal yang menghambat adalah berupa tidak adanya implementasi qanun yang menetapkan untuk dapat berdirinya industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, meskipun berbagai

macam desain kebijakan telah dirancang, namun tidak dapat diimplementasikan secara baku dan sah. Faktor lain dapat berupa kurang modal dasar pembangunan yang dimiliki oleh daerah kabupaten sendiri. (hasil wawancara, Kamis 26 September 2013).

Penetapan lokasi kawasan industri akan menjadi tempat bagi para investor (perusahaan pengelola dan perusahaan pengguna jasa) untuk menanamkan modalnya. Ketertarikan investor dalam berinvestasi pada kawasan industri biasanya mengacu dan mempertimbangkan adanya kepastian hukum, ketersediaan bahan baku, kemudahan perizinan, jaminan keamanan dan adanya fasilitas pelabuhan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen :

Faktor eksternal yang menghambat pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen berupa kurangnya akses bantuan modal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi serta tidak lancarnya arus investasi luar negeri yang masuk ke Kabupaten Bireuen. (hasil wawancara, Kamis 26 September 2013).

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya teknologi pengolahan untuk percepatan proses produksi dan lemahnya pengendalian kualitas terhadap komoditas barang yang dihasilkan sehingga dapat mempengaruhi kinerja citra komoditas yang sudah terbentuk. Permasalahan tersebut seharusnya mendapat perhatian dan solusi dari Pemerintah Daerah karena terkait dengan peran yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebuah industri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen adalah pemerintah Kabupaten Bireuen telah menetapkan kebijakan bagi investor dalam berinvestasi di daerah Kabupaten Bireuen, terutama mengenai kebijakan tatacara penanaman modal dari para investor memang sudah lama ditetapkan, namun yang menjadi kendala kurangnya dana investasi dalam

mengembangkan sektor industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen dikarenakan para investor terlalu mempertimbangkan resiko jangka panjang dan kondisi wilayah Kabupaten Bireuen sendiri. (hasil wawancara, Kamis 26 September 2013).

Akibat dari kurangnya perencanaan dan desain pemerintah daerah dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu, sehingga sampai saat industri pengolahan di Kabupaten Bireuen belum terlaksana sebagaimana perencanaan dasar. Dampak lain adalah hasil komoditas kelapa di Kabupaten Bireuen terpaksa di ekspor dalam bentuk produk primer dengan harga yang relatif murah.

Upaya Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen Dalam Pengembangan Industri Kelapa Terpadu

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. Berikut adalah hasil wawancara dengan Staf Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Relokasi kegiatan dan desentralisasi kegiatan ekonomi dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen, Staf Bidang Perindustrian Kabupaten Bireuen telah menganjurkan kepada pihak yang lebih berwenang supaya mendirikan sebuah industri dalam memperbaiki gejala ekonomi daerah, industri tersebut adalah industri pengolahan kelapa secara terpadu, karena Kabupaten Bireuen memiliki hasil kelapa yang cukup untuk diolah. (hasil wawancara, Kamis 26 September 2013).

Kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bireuen merupakan langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi di sektor

industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik.

Staf bidang perindustrian Kabupaten Bireuen sudah pernah memberikan pengarahan atau penyuluhan terhadap akses pasar hasil produksi dengan mengarahkan kemana hasil produksi itu akan dipasarkan, bahkan pihak dinas akan membantu memperluas jaringan pasar agar produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan dalam wilayah produksi saja atau dalam pasar regional, jika memang industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen benar-benar dapat berdiri. (hasil wawancara, Kamis 26 September 2013).

Pelaku bisnis (produsen, penyalur, pedagang, dan investor) lebih suka berkecimpung dalam bidang industri karena sektor ini memberikan margin keuntungan yang lebih menarik. Berusaha dalam bidang industri dan berniaga hasil-hasil industri juga lebih diminati karena proses produksi serta penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia, tidak terlalu bergantung pada alam semi musim atau keadaan cuaca. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang kelapa di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Jika industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen dapat berdiri, maka akan sangat menguntungkan para pedagang, apabila pedagang diajak untuk ikut serta dalam wadah koperasi, akan mudah memperoleh dana atau modal dan mudah dalam melakukan transaksi jual beli bahkan dalam hubungan ekspor impor, namun sekarang pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki qanun atau semacam peraturan yang baku sehingga membuat para pedagang menjadi ragu. (hasil wawancara, Selasa, 01 Oktober 2013).

Dalam upaya mendorong kemajuan industri, pemerintah Kabupaten Bireuen juga merumuskan kebijakan publik pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan, yang erat

kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang terkena langsung dampaknya. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan Negara yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen tidak mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap para pedagang jika pengembangan industri kelapa di Kabupaten Bireuen membuat para pedagang harus mencari produser sampai ke Medan Sumatera Utara untuk menampung kelapa-kelapa Aceh pada umumnya dan Bireuen khususnya. (hasil wawancara, Selasa, 01 Oktober 2013).

Untuk mendukung pengembangan kawasan industri Bireuen sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen perlu menetapkan sub regional kawasan industri Bireuen dengan berpedoman kepada tata ruang wilayah. Peruntukan dan penggunaan tanah di kawasan industri Bireuen untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan kawasan Industri. Peruntukan dan penggunaan tanah harus mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh areal tanah yang terletak di kawasan industri Bireuen dikuasai oleh daerah dengan hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah.
- b. Menggunakan tanah untuk pelaksanaan pengembangan dan pembangunan kawasan industri Bireuen.
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah kepada pihak ketiga dengan hak sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Menetapkan dan menerima pajak, retribusi daerah, serta uang pemasukan sewa atas tanah.

Proses perizinan dalam rangka pembangunan industri serta banyaknya terobosan baru dari Pemerintah Kabupaten Bireuen tentunya menjadi prestasi tersendiri. Akan tetapi, prestasi tersebut seringkali diiringi dengan dampak-dampak negatif. Salah satunya yaitu adanya pabrik industri yang setelah dibangun ternyata tidak dapat dioperasikan. Hal tersebut sangatlah mungkin dikarenakan proses perizinan yang terlalu mudah dan kurangnya kontrol pemerintah sehingga pabrik tersebut kini hanya menjadi bangunan monumental saja. Selain itu juga terdapat beberapa industri dan merupakan salah satu industri unggulan yang saat ini kondisinya sedang terancam dikarenakan kurangnya modal dan pemasaran.

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kelapa Terpadu di Kabupaten Bireuen

Pembangunan sektor industri memiliki peranan yang penting, oleh karenanya perlu dibina serta dikembangkan daya saing secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen perlu memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri di daerah yang berkesinambungan, terarah dan berwawasan lingkungan, diperlukan di suatu kawasan industri.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Pembangunan sentra industri pengolahan kelapa secara terpadu diharapkan bisa mengembangkan *leading sector* sehingga mampu meningkatkan produktifitas wilayah Kabupaten Bireuen dari sebelum dan setelah direncanakan desain sentra industri pengolahan hasil perkebunan kelapa, yaitu meningkatkan kesempatan kerja yang baik bagi petani kelapa.

Industri kelapa terpadu yang berkembang di Kabupaten Bireuen memiliki hasil produksi yang berbeda, seperti industri kelapa terpadu di Desa Simpang Pulo Awe Kecamatan Kuta Blang yang berdiri pada tahun 1991 yang memproduksi minyak kelapa, dengan nama pemiliknya adalah Bapak Rahmat. Industri kelapa terpadu di Desa Cot Loreng Kecamatan Peudada yang berdiri pada tahun 2009 yang memproduksi alas kaki dari sabut kelapa, dengan nama pemiliknya adalah Bapak Muhammad Hasan, dan saat ini industri tersebut tidak melakukan operasional lagi. Selanjutnya industri kelapa terpadu di Desa Meunasah Asan Kecamatan Simpang Mampam yang berdiri pada tahun 2010 yang memproduksi alas kaki dari sabut kelapa, dengan nama pemiliknya adalah Bapak Suryadi.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, ketiga industri kelapa terpadu di Kabupaten Bireuen tersebut memanfaatkan bahan baku seperti daging kelapa dan sabut kelapa hasil produksi tanaman kelapa di daerah. Bahan baku tersebut bersumber dari areal perkebunan kelapa di Kabupaten Bireuen yang luasnya 4.372 Ha. Dari besarnya lahan tanam tersebut menghasilkan biji kelapa rata-rata sejumlah 36.328 ton pertahun. Dari total produksi tersebut, selain mampu memenuhi konsumsi masyarakat dan pemenuhan bahan baku industri di daerah, sisa dari produksi perkebunan kelapa juga di ekspor keluar daerah.

Dalam mengembangkan usahanya, para pemilik industri sangat mengharapkan adanya kebijakan pemerintah daerah, salah satunya adalah penyaluran bantuan modal produksi. Namun dalam kenyataannya, pemerintah daerah khususnya dinas perindustrian Kabupaten Bireuen belum menjadi fasilitator dan regulator dalam

meningkatkan perkembangan industri yang lebih maju dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.

Faktor Penghambat Pengembangan Industri Kelapa Terpadu di Kabupaten Bireuen

Dalam pelaksanaan selama beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut ternyata mampu memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen terutama peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Kabupaten Bireuen berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan.

Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif.

Di samping itu masih kurang kepedulian pihak pemerintah daerah dalam hal informasi pasar, perkembangan dan persaingannya. Padahal mereka seharusnya bertanggung jawab dan sangat berkepentingan terhadap perkembangan usaha kecil di daerahnya. Distorsi pasar yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan Pemerintah yang tidak kondusif, yang disengaja maupun yang tidak disengaja lebih menguntungkan pengusaha besar, termasuk investor asing.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat dunia usaha, khususnya para pengusaha sektor industri terpadu yang menyangkut peluang dan pangsa pasar yang sangat memungkinkan dimasuki oleh para pengusaha. Jadi produksi sektor industri diharapkan omset penjualannya berskala

makro baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen perlu diatur dengan kebijakan pemerintah yang sesuai, namun dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Maka dalam hal ini akan berdampak terhadap ketidakstabilan harga bahan baku di pasar, salah satunya adalah kestabilan harga kelapa pada tingkat produsen. Harga kelapa di pasar daerah berkisar antara Rp.1.000 sampai Rp.1.700, hal ini menyebabkan produsen kelapa di Kabupaten Bireuen lebih memilih untuk menjual kelapa ke Medan dengan harga Rp.4.000 sampai Rp.5.000

Dalam melakukan kegiatan produksi, ketiga industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen memerlukan jumlah modal yang besar, salah satunya adalah industri kelapa secara terpadu yang berkembang di Desa Pulo Awe Kecamatan Kuta Blang secara rata-rata mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku produksi sebesar Rp. 175.000.000 perbulan, biaya kerja sebesar Rp. 10.000.000 perbulan, dari besarnya biaya yang dikeluarkan industri ini memperoleh tingkat keuntungan sebesar Rp. 120.000.000 perbulan.

Faktor lain yang menghambat pengembangan industri kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen adalah berupa kurangnya modal dalam melakukan kegiatan produksi. Selama ini para pemilik industri menjalankan usahanya dengan modal sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah daerah perlu melakukan kerja sama dengan pihak investor untuk dapat membantu para pemilik industri dalam memperoleh tambahan modal melalui investasi yang masuk ke Kabupaten Bireuen.

Upaya Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen Untuk Dapat Mengembangkan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kelapa Terpadu

Pemilihan lokasi industri strategis dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas, kelestarian lingkungan yang maksimal, sosial budaya masyarakat, serta

memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sumbangan dan peran yang optimal dari masyarakat, dan diperlukan pembinaan yang lebih intensif terhadap industriawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk memudahkan pembinaan dan pengarahan serta pemberian bantuan atau fasilitas, agar sesuai dengan dunia usaha, maka diperlukan pengorganisasian unit-unit produksi. Dengan demikian akan memudahkan pengontrolan dan mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan industri, dan faktor-faktor yang dapat menopang sektor industri tersebut.

Dalam upaya mengembangkan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen perlu didukung dan disnergikan dengan program pembangunan antar instansi dan sektor lainnya, baik dari unsur pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam pengembangannya. Pembangunan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Kabupaten Bireuen memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan arah dan sasaran tersebut pembangunan industri harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang.

Pengelolaan kawasan industri Bireuen dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk atau bekerjasama dengan perusahaan kawasan industri yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri Bireuen dikerjakan oleh pihak perusahaan kawasan industri, maka dapat dilakukan melalui sistem BOT (*Built, Operate and Transfer*), BOO (*Built, Own and Operate*), dan kontrak manajemen yang saling menguntungkan.

Dalam hal tersebut, pemerintah kabupaten bireuen perlu memberikan kemudahan berupa pembebasan atau keringanan pajak/retribusi daerah atau pungutan lainnya kepada badan usaha, atau perusahaan yang melakukan kegiatan

ekonomi di kawasan industri Bireuen. Pembebasan pajak/retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2(dua) tahun atau setelah usahanya berproduksi. Keringanan pajak/retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya dapat diberikan paling tinggi 50% (lima perseratus) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pemberian keringanan tersebut perlu diberikan kepada:

- a. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- b. Bidang-bidang usaha prioritas pengembangan kawasan industri.
- c. Bidang-bidang usaha pembangunan prasarana.

Pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan pajak/retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya dilakukan dengan mengingat prioritas bidang-bidang usaha pengembangan dan pembangunan kawasan industri serta dengan memperhatikan dampak lingkungan hidup. Selain pembebasan atau keringanan dapat juga diberikan tambahan kemudahan atau keringanan lainnya kepada suatu perusahaan apabila memang sangat diperlukan bagi pertumbuhan kawasan industri berupa kemudahan dibidang administrasi dan pengurusan perizinan kegiatan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengembangan kawasan industri mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan kawasan industri Bireuen dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- b. Mengatur pemanfaatan kawasan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri Bireuen dan Sub Regional.
- c. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di kawasan industri Bireuen dan sub regional termasuk

pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan di kawasan industri Bireuen;

e. Memberikan dan mengendalikan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan, maka penulis mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan serta memberikan saran, sebagai berikut:

Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen harus berupaya dalam mengembangkan industri kelapa secara terpadu adalah memberikan pengarahan atau penyuluhan terhadap akses pasar hasil produksi dengan mengarahkan kemana hasil produksi itu akan dipasarkan, bahkan pihak dinas akan membantu memperluas jaringan pasar agar produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan dalam wilayah produksi saja atau dalam pasar regional.

Dinas terkait khususnya Dinas Perindustrian Kabupaten Bireuen untuk dapat menerapkan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan peraturan pendirian industri di daerah berdasarkan Qanun Perindustrian yang berlaku. Dan diharapkan bagi masyarakat dan investor untuk dapat memperhatikan kondisi ekonomi wilayah Kabupaten Bireuen dalam berinvestasi guna mendorong terciptanya pembangunan industri kelapa secara terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho (2003) *Manajemen Kebijakan Publik*, Jakarta, Erlangga.
- Asnawi (2005) *Kegunaan Kelapa Dan Perkembangan Industri Kelapa Terpadu*, Bandung. IPB.
- Dinata (2003) *Perkembangan Lembaga Kenegaraann Dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Henry, Simamora (2004) *Prosedur Desain Dan Rancangan Kebijakan*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Irfan, Isamy. (2004). *Prinsip-Prinsip Kebijakan-Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Maryani (2007) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sektor Industri*, Jakarta, Erlangga.
- Pamudji. (2002). *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara,
- Sabariah (2005) *Manajemen Dan Fungsi Pemerintah*, Bandung, PT Rafika Adiatama
- Santoso (2008) *Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah*, Bandung, PT Bumi Aksara
- Setyawan (2005) *Teori Pemerintah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Susanto (2010) *Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Terkait Dengan Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China*.
- Syahrudin (2010) *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri*.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana, Jakarta
- Perundangan dan Peraturan-Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
- Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ruang Dinas Kabupaten Bireuen
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri Umum
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri Nasional